



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1134>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 415-425

Research Article

Konsep Kesejahteraan Politik Al-Farabi

Atsir Ahmad Salman¹, Muhammad Fajar Pramono², Amir Reza Kusuma³,
Iqbal Maulana Alfiansyah⁴

1. Universitas Darussalam Gontor; atsirahmadsalman44@student.afi.unida.gontor.ac.id 
2. Universitas Darussalam Gontor; mfpramono@unida.gontor.ac.id
3. Universitas Darussalam Gontor; amirrezakkusuma@gmail.com
4. Universitas Darussalam Gontor; maulanaiqbal@unida.gontor.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 17, 2024
Accepted : August 07, 2024

Revised : July 22, 2024
Available online : October 25, 2024

How to Cite: Atsir Ahmad Salman, Muhammad Fajar Pramono, Amir Reza Kusuma and Iqbal Maulana Alfiansyah (2024) "Al-Farabi's Concept of Political Welfare", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 415-425. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1134.

Al-Farabi's Concept of Political Welfare

Abstract. The State is formed because of the human need to live together, so it can be concluded that the existence of the State is a necessity in life human. Al-Farabi speaks with physical and spiritual happiness, Sa'adah maddiyah wa ma'nawiyah, this will not be obtained by people unless they live in a community in an ideal state, al-Madinah al-fadilah. Al-Farabi's political theory of the State boils down to the regulation of the existence of god and devotion to him (theocentric). In contrast to Greek political and statehood theories, al-Farabi later stated that the purpose of statehood was obtain

happiness and justice. Al-sa'adah means happiness, contains the understanding of things that are good to us that are obtained a person is a gift from Allah SWT alone.

Keywords: Al Farabi, country, Development, Education.

Abstrak. Negara terbentuk karena kebutuhan manusia untuk hidup bersama, maka dapat disimpulkan bahwa adanya Negara merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Al-Farabi membahasakan dengan kebahagiaan jasmani maupun rohani, Sa'adah maddiyah wa ma'nawiyah, ini tidak akan diperoleh manusia kecuali mereka hidup dalam sebuah komunitas di negara ideal, al-Madinah al-fadilah. Teori politik al-farabi tentang Negara ini bermuara kepada pengaturan tentang adanya tuhan dan pengabdian terhadapnya (teosentris). Hal ini berbeda dengan teori-teori politik dan kenegaraan Yunani, al-farabi kemudian menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah memperoleh kebahagiaan dan keadilan. Al-sa'adah diartikan dengan kebahagiaan, mengandung pengertian tentang hal-hal yang baik kepada kita bahwa yang diperoleh seseorang merupakan pemberian dari Allah SWT semata

Kata Kunci: Al Farabi, negara , Perkembangan, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Al-Farabi, nama lengkapnya adalah Abu Muhammad ibn Muhammad Ibn Tarkhan ibn Auzalagh. Ia lahir di Wasij, salah satu distrik Farab (sekarang daerah tersebut dikenal dengan kota Atrar/Transoxiana) Turkistan pada tahun 257 H /870 M. Ayahnya adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Ia dikenal pada Abad Pertengahan dengan sebutan Abu Nashr (Abunaser), sedangkan nama Al-Farabi yang dikenal oleh kaum Muslim diambil dari nama ia dilahirkan yakni kota Farab.

Sejak kecil Al-Farabi dikenal dengan ketekunan dan rajin dalam belajar, apalagi dalam mempelajari berbagai bahasa. Penguasaannya yakni bahasa Iran, Turkistan dan Kurdikistan sangat ia pahami. Namun, malah sebaliknya, bahasa Yunani dan bahasa Suryani yakni sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang pada waktu itu dikenal luas tidak dapat dipahaminya. Ia belajar kaidah-kaidah bahasa Arab kepada Abu Bakar al-Saraj dan belajar logika serta filsafat kepada seorang Kristen, Abu Bisyr Mattius ibnu Yunus. Kemudian, ia pindah ke Harran, pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil dan berguru kepada Yuhanna ibnu Jailani. Tetapi tidak berapa lama di Harran, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Selama di Baghdad ia banyak menggunakan waktunya untuk berdiskusi, mengajar, mengarang, dan mengulas buku-buku filsafat. Dalam dunia intelektual Islam ia mendapat kehormatan dengan julukan al-Mu'allim al-Sani (guru kedua), sedangkan yang menjadi guru pertama adalah Aristoteles yang menyandang gelar al-Mu'allim al-Awwal (guru pertama), selain itu Al-Farabi juga menyandang predikat al-Syaikh al-Rais (Kiyai Utama), gelar-gelar ini didapatkan karena ia banyak memahaminya filsafat Aristoteles sebagai seorang filosof yang ternama, dalam hidupnya ia dikenal seorang yang tidak berkecimpung di dunia politik pemerintahan. Atas dasar inilah ia mendapatkan sebuah kebebasan dalam mengeluarkan pemikirannya yang tidak terikat dengan dogma-dogma yang berbau politik di kala itu. Satu sisi menguntungkan dirinya, tetapi kalau dilihat dari segi pemerintahan maka ia juga rugi karena

kurangnya pengalaman dalam mengelola urusan kenegaraan, juga untuk menguji teori-teorinya terhadap kenyataan politik di kala itu.

Karya-karya Al-Farabi

Di antara pemikiran Al-Farabi dituliskan menjadi sebuah karya, namun ciri khas karyanya Al-Farabi bukan saja mengarang kitab-kitab besar atau makalah-makalah, ia juga memberikan ulasan-ulasan serta penjelasan terhadap karya Aristoteles, Iskandar AID fraudisimy dan Plotinus. Di antara ulasan Al-Farabi terhadap karyakarya mereka adalah sebagai berikut:

1. Ulasannya terhadap karya Aristoteles
2. Burhan (dalil),
3. Ibarat (keterangan)
4. Khitobah (cara berpidato),
5. Al-Jadal (argumentasi/berdebat),
6. Qiyas (analogi),
7. Mantiq (logika),
8. Ulasannya terhadap karya Plotinus "Kitab Al-Majesti fi-Ihnil Falaq",
9. Ulasannya terhadap karya Iskandar Al Dfraudisiy tentang "Maqalah Fin-nafsi".

Sedangkan karya-karya nyata dari Al-Farabi lainnya :

1. Al-Jami'u Baina Ra'yani Al-Hkiman Afalaton Al Hahiy wa
2. Aristho-thails (pertemuan/penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles),
3. Tahsilu as Sa'adah (mencari kebahagiaan)

Filsafat Emanasi Salah satu filsafat Al-Farabi adalah teori emanasi yang di dapatnya dari teori Plotinus apabila terdapat satu zat yang kedua sesudah zat yang pertama, maka zat yang kedua ini adalah sinar yang keluar dari yang pertama. Sedangkan (Yang Esa) adalah diam, sebagaimana keluarnya sinar yang berkilauan dari matahari, sedang matahari ini diam. Selama yang pertama ini ada, maka semua makhluk terjadi dari zat-Nya, timbullah suatu hakikat yang bertolak keluar. Hakikat ini sama seperti form (surat) sesuatu, di mana sesuatu itu, keluar darinya.

Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan. Karena masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi mengistilahkannya dengan al-Madinah al-Fadilah. Al-Madinah al-Fadilah dalam konteks pemikiran politik modern membahas tentang relasi masyarakat dan Negara, akan memunculkan asumsi dasar antara seberapa kuatnya posisi masyarakat berhadapan dengan Negara atau malah justru Negara yang lebih kuat sebagai alat penindas rakyat. Pada kalangan intelektual Barat terjadi perbedaan polemik konsep Negara dan masyarakat. John Locke dan JJ Rousseau memandang rakyat sebagai penguasa, meskipun keduanya berbeda

pendapat mengenai fungsi perjanjian. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat berdasarkan hukum alam. Setiap orang bertindak secara alamiah.

Kemudian pada Tahun 1792, muncul pula pendapat Thomas Paine. Masyarakat memiliki posisi berseberangan secara diametral dengan Negara. Bahkan dia menganggapnya sebagai antitesa dari Negara, sehingga membutuhkan konsep yang disebut *civil society*. Menurut Paine *civil society* adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberikan peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Hegel lebih lanjut menjelaskan bahwa karena eksistensi *civil society* terbentuk dari arena persaingan ekonomi, yang intern di dalam dirinya mengandung potensi perpecahan, mau tak mau ia butuh campur tangan Negara. Karl Marx melanjutkan dialektika pemikiran Hegel tentang *civil society* dalam mengembangkan teorinya tentang masyarakat borjuasi kapitalis. Senada dengan ekonomi Adam Smith. Walaupun Marx bangga menjadi murid spiritual Hegel tetapi pandangannya tentang Negara bertolak belakang dengan pandangan gurunya Marx berpendapat bahwa negara pada hakikatnya adalah aparat atau mesin operasi (penindasan), tirani dan eksploitasi kaum pekerja oleh pemilik alat-alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang kekayaan distribusi kekayaan yang mencelakakan kelas pekerja. Gramsci dalam pemikirannya diantara negara dan *civil society* senantiasa terdapat suatu hubungan timbal balik. Sementara Antonio Gramsci tidak memahami *civil society* sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Thomas hobbes menekankan pentingnya kekuasaan pada negara karena kalau tidak, warga akan saling bentrok dalam memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Dan pandangan Hobbes tersebut diperkuat Fukuyama, karena dalam pandangannya Negara harus diperkuat. Yang ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat. Tidak hanya dikalangan intelektual Barat, klangan cendekiawan muslim pun terjadi perdebatan panjang, kerena persoalan sistem politik dalam islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslimin. Dalam sejarah islam, konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama paling tidak terkandung dua maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Syamsuddin. Pertama, untuk menemukan idealitas islam mengenai Negara, baik secara teoritis maupun secara formalis, artinya, ini sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk Negara dalam islam. Kedua, untuk mengupayakan idealisasi dari islam tentang prosedur penyelenggaraan negara, baik pencarian substansial kenegaraan maupun segi praktis bernegara.

Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa Negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW, masih di Makkah (611-622 M) tidak menjalankan dakwahnya karena kekuatan politik didominasi oleh kaum Quraisy yang memusuhi Nabi, tetapi setelah hijrah ke Madinah Nabi telah mempunyai komunitas sendiri yang berjanji setia untuk hidup bersama dengan suatu kesepakatan menggunakan aturan yang disepakati bersama, yaitu piagam Madinah. Kehidupan Nabi bersama umatnya Membahas tentang pemikiran al Farabi mengenai al-Madinah al-Fadilah banyak kalangan yang melihat gagasannya dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan Aristoteles. Maka dari itu ia disebut sebagai guru kedua (al-Muallim al- thani) sebagai lanjutan dari Aristoteles yang disebut guru pertam (al-Muallim al- Awal)⁵.

Al-Madinah al-Fadilah ini kemudian diterjemahkan dengan beragam istilah oleh beberapa kalangan, seperti *civil society* dan masyarakat madani, sebenarnya al-Farabi bertumpu pada dua hal: pertama, konsep tentang pemimpin dan yang dipimpin, atau konsep kepemimpinan. Kedua, konsep kebahagiaan, ia menegaskan bahwa manusia hidup butuh seorang pemimpin (*muallim*) untuk menemukan kebahagiaan mereka, pemikiran al-Farabi tersebut dilandaskan pada dua alasan realitas diri manusia. Yaitu, kecenderungan manusia untuk selalu mencari kebahagiaan hidup dan realitas bahwa manusia adalah makhluk sosial.

Seperti yang dikatakan Aritoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politikon*. Secara alamiah mereka tidak akan lepas dari kehidupan sosial, oleh karena itu, manusia akan terus cenderung terus berpolitik untuk bertahan hidup.

Konsep al-Madinah al-Fadilah oleh al-Farabi yang akan dicoba untuk ditelaah sejauh mana ia memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran politik. Terutama dalam persoalan bentuk masyarakat dan negara. Apakah al-Farabi lebih cenderung pada teokrasi, apakah monarki, atau justru ia memperkuat pandangan politik al-Maududi dengan konsep teo-demokrasi, sebab sudah maklum bersama bahwa al-Madinah al-Fadilah selama ini diterjemahkan oleh beberapa kalangan sebagai masyarakat madani atau *civil society*. Perbedaan pandangan mengenai masyarakat dan negara dan bagaimana relasi diantara keduanya dalam realitas bernegara. Ada yang memposisikan Negara superior atas masyarakat, dan ada yang menempatkan masyarakat lebih kuat dalam berhadapan dengan negara. Para pakar ilmu politik berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara analisa Islam dan al-Farabi

Al-Farabi mengistilahkan negara sebagai *agency* (alat) dan masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam Masyarakat artinya negara adalah suatu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai suatu kedaulatan.

Dari beberapa definisi yang ada tersebut, kemudian Ubaidillah mendefinisikan negara sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangundangan melalui penguasaan (*control*) monopolitis dan kekuasaan yang sah. Untuk lebih memberikan pemahaman tentang negara, apapun definisi yang diberikan oleh para ahli politik. Intinya bahwa negara itu memiliki tiga sifat utama. Yaitu, memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Pertama, sifat memaksa dari suatu negara ini dimaksudkan agar pertauran perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai. Karena itu negara harus memiliki sifat memaksa. Kedua, sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Ketiga, sifat mencakup semua (*call encompassing, all embracing*) semua peraturan perundang-undang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Menurut Miriam Budiardjo selain ketiga sifat tersebut negara juga harus memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Penting juga untuk dipahami bahwa negara bukan hanya sebuah

unit politik dan unit hukum yang memiliki penduduk dan wilayah, tapi juga harus diakui keberadaannya oleh Negara lain. Karena adanya pengaruh sekularisasi maka teori-teori tentang negara dan pembentuknya dalam tradisi keilmuan Barat tidak lagi mempertimbangkan persoalan agama, tetapi lebih kepada kebebasan tiap individu dalam masyarakat. Berbeda dengan pemikir muslim abad pertengahan yang mencetuskan teori dalam konteks kekhalifahan, seperti al-Mawardi atau Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting. Tetapi, tidak berarti pula agama tidak dapat hidup tanpa negara karena menggunakan pendekatan sosiologis.

Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi baik antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi. Bagi al-Farabi negara tak ubahnya bagaikan susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan kemampuan dan kesanggupannya. Demikian pula dengan negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kecakapan yang berbeda-beda. Al-Farabi dalam filsafatnya lebih menekankan pemberdayaan manusia dalam satu negara sesuai dengan spesialisasi dan kemampuan masing-masing. Al-Farabi membuat prioritas tentang perlunya pemahaman dalam satu agama. Ia juga menyatakan bahwa keutamaan berfikir dan keutamaan akhlak merupakan keutamaan yang semua agama mengakuinya sebagai hal yang sangat penting.

Komparasi Pemikiran Al-Farabi dengan Demokrasi

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan, masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarakat yang feodal, kehidupan spiritual dikuasai oleh paus dan pejabat agama. Sedangkan kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara bangsawan. Sehingga demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan ini.¹⁴ Pada abad pertengahan al-Farabi memunculkan teori-teori bernegara, diantaranya adalah kebebasan bagimasyarakat, menyelesaikan persoalan dilakukan dengan cara musyawarah dan adanya pembagian kekuasaan¹⁵.

Konsep Filsafat politik Al-Farabi

Filsafat Al-Farabi ini mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari Yang Satu. Tuhan bersifat Maha-Satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, Maha Sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Kalau demikian hakekat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari Yang Maha Satu? Menurut Al-Farabi alam ini terjadi dengan cara emanasi.

Persoalan di atas, adalah sebuah rasa penasaran dari Al-Farabi karena ia menemui kesulitan dalam menjelaskan bagaimana terjadinya banyak (alam) yang bersifat materi dari Yang Maha Esa (Allah) jauh dari arti materi dan Mahasempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan Penggerak Pertama (prime cause), ini telah dikemukakan oleh Aristoteles. Di dalam doktrin ortodoks Islam (al-mutakallimin), Allah adalah pencipta (Shani, Agent), yang menciptakan dari tiada menjadi ada (*creatio ex nihilo*). Al-Farabi dan para filosof Muslim lainnya mencoba untuk mengIslamkan doktrin ini. Maka mereka mencoba untuk melihat

doktrin Neoplatonis Monistik tentang emanasi. Dengan demikian, Tuhan yang dianggap penggerak Aristoteles menjadi Allah Pencipta, yang menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada secara pancaran. Dalam arti, Allah menciptakan alam semenjak azali, materi alam berasal dari energi yang qadim, sedangkan susunan materi yang menjadi alam adalah baharu. Sebab itu, menurut filosof Muslim, Kun (jadilah) Allah yang termaktub dalam al-Qur'an ditunjukkan kepada Syai (sesuatu) bukan kepada La syai' (nihil).

Persoalan muncul, karena di era Kristen (Abad Pertengahan) orang Barat tetap menganut epistemologi Parmanidean. Tatkala teologi mereka menolak kemestian wujud pada makhluk, mereka tak dapat menyangkal bahwa sebagai wujud yang intelligible (wujud yang terfahami akal manusia), kewujudan makhluk haruslah ada. Secara teologi mereka menerima kewujudan makhluk sebagai sesuatu yang mungkin, sementara secara epistemologis kewujudan makhluk dalam pikiran malah dipandang sebagai sesuatu yang harus ada.

Pertentangan pandangan dalam hal teologi dan epistemologi ini semakin rumit tatkala mereka menciptakan pula pemisahan antara esensi dan eksistensi pada makhluk. Esensi makhluk adalah kewujudannya di dalam pikiran, oleh karena itu ia harus ada (Necessary Being). Sementara eksistensi makhluk di luar pikiran, di dunia material, bersifat mungkin (contingent). Lalu bagaimana dengan Tuhan? Pada abad ke-13, penghulu alam Skolastik, Thomas Aquinas, memberi pandangan bahwa mengenai Tuhan esensi dan eksistensi-Nya harus sama dan kewujudan keduanya harus ada.

Penjelasan lebih terperinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada bagian II sebagai faham yang terkandung dalam istilah sekularisasi; sementara sekularisme menunjukkan sebuah hasrat untuk meraih kemutlakan melalui sains dan positifisme-logis hingga dipandang sebagai sebuah 'ideologi tertutup'. Melalui penelusuran terhadap akar gagasan sekularisme dan sekularisasi, beliau telah sampai pada telaah sekaligus kritiknya pada alur laju pemikiran Barat masa kini yang sedang berubah dari 'rejim' positivism logis (Modernisme) menuju 'rejim' skeptik-relativistik yang menjadi penunjang utama Pascamodernisme.

Bila kita baca telaah Prof. al-Attas ini, kita dapat melihat bahwa beliau telah mengantisipasi baik pengaruh positivism-logis yang dibawa oleh sekularisme maupun relativisme-historis yang termuat dalam sekularisasi. Yang pertama ialah dasar bagi alam fikir modern dan yang kedua ialah landasan dari apa yang sekarang kita kenal sebagai Pascamodernisme.

Dua bagian awal Islām and Secularism dengan ringkas namun mendalam memberi kita gambaran utuh mengenai apa yang disebut sebagai Barat dan faham apa yang menjadi asas pokok tunjang peradabannya. Hal ini penting untuk diketahui dan disadari oleh kita Kaum Muslimin. Telaah Prof. al-Attas mengenai akar-akar metafisis-filosofis Peradaban Barat ini seolah menjadi pengingat bagi kita Kaum Muslimin untuk bersiaga, bersiap dan waspada bagi kemungkinan menyusupnya faham-faham mereka ke dalam alam berfikir Muslim. Sesuatu yang kini, 30-40 tahun setelah Islām and Secularism diterbitkan, kita hadapi di depan mata.

Istilah keadaan berhutang (indebtedness/dāna), penyerahan diri (submissiveness/ dāna nafsahu), kuasa peradilan (judicious power/daynūnah), dan

kecenderungan alami (natural inclination/fitrah) kemudian dijelaskan Prof. al-Attas dalam kerangka ruhaniah. Bahwa manusia sesungguhnya berhutang kewujudan kepada Allāh, Sang Pencipta dan Pemelihara. Kewujudan manusia sesungguhnya hanyalah “pinjaman” dari Sang Wujud Mutlak, Allāh Subhānahu wa Ta‘āla. Pengibaran semacam ini memudahkan kita memahami kedudukan kewujudan makhluk, khususnya manusia, dihadapan kewujudan Tuhan.

Keberhutangan eksistensial ini ditelaah Prof. al-Attas melalui dua penjelasan. Pertama, melalui tautan akliyah sebagaimana dikenal dalam tradisi ulama kalam. Hal ini dilakukan dengan menimbang ayat al-Qur‘ān, Surāh al-Mu‘minūn [23]: 12-14. Bahwa seratus tahun yang lalu kita sebenarnya tidak ada. Tubuh badan kita dahulu tidak ada dan sekarang ada. Merujuk pada ayat al-Mu‘minūn tersebut, manusia sesungguhnya dijadikan dari tiada menjadi ada (edisi ISTAC, hlm. 55).

Keadilan dan kesejahteraan al-Farabi

Keadilan (sarana menjaga keseimbangan hidup), Nurcholis Madjid menguraikan kata “keadilan” ditinjau dari segi kebahasaan, dalam kitab suci al-Qur‘ān disebutkan perkataan “adil (adl)” ada pula perkataan “qist”, “wist”, dan “mizan”. Semua pengertian berbagai kata itu bertemu dalam suatu ide umum sikap tenang yang berkesinambungan dan jujur. Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (mauzan, balanced) tidak pincang. Dalam satu kesatuan secara bersama-sama menuju tujuan yang sama dengan persyaratan yang samadan mempunyai ukuran yang tepat Potensi dasar manusia, al-Farabi memandang tingginya urgensi peran masyarakat dalam bernegara adalah karena didasarkan pada potensi dasar manusia. Menurutnya ada 4 potensi atau dalam istilah al-Farabi disebut dengan keutamaan yang dimiliki oleh manusia yaitu: teoritas, berfikir, akhlak dan berkreasi. Keutamaan teoritas adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari alam semesta. Keutamaan berfikir adalah sebuah daya atau potensi dasar yang dimiliki oleh manusia dan hasilnya akan bergantung pada bagaimana pemanfaatannya. Keutamaan berkreasi menurut al-Farabi dapat diperoleh dengan dua cara yaitu: pertama, dengan pernyataan-pernyataan yang memuaskan dan memberi rangsangan kepada jiwa. Kedua, dengan cara pemaksaan, yaitu suatu cara yang diterapkan untuk orang-orang yang sombong. Manusia yang mampu menyadari hakikat kewujudannya akan menyerahkan diri sepenuhnya dengan khidmah, memperhambakan diri dengan suka rela kepada Tuhan. Sebagaimana seorang yang berhutang tunduk patuh pada kuasa sang pemberi hutang. Dan intipati keberhutangan manusia ialah pada kewujudannya sendiri. Tak ada jalan lain bagi manusia selain menyerahkan diri sepenuhnya kehadapan dan pengembalian semacam ini ialah pengembalian yang menguntungkan manusia itu sendiri. Seperti hujan yang senantiasa kembali ke bumi dan membuat hidup (menguntungkan) bumi itu sendiri (al-Baqarah [2]: 164).

Penghambaan manusia kelak akan diperhitungkan dan diberikan balasan yang adil di Hari Pembalasan atau yawm al-dīn dan dikenal juga dengan Hari Perhitungan atau yawm al-ḥisāb. Siapa yang “mengembalikan” dirinya kepada Tuhan, maka di akhirat ia akan mendapat keuntungan.

Manusia yang telah sampai pada hakikat penghambaan diri dihadapan

Tuhannya, ialah manusia yang telah memenuhi tujuan kewujudannya, tujuan penciptaannya. Atau dengan kata lain ia telah memenuhi kecenderungan alaminya sebagai hamba Tuhan. Ia telah memenuhi fiṭrah penciptaannya. Manusia yang telah memenuhi persaksiannya “di zaman alastu”. Manusia yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan.

Aslama ialah kata yang mewakili penyerahan diri ini. Dan agama (dīn) yang menyatakan penyerahan diri menyeluruh (istislām) kepada Allāh Subḥānahū wa Ta‘ālā adalah Islām, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allāh (Āli ‘Imrān [3]: 85 dan 19). Dalam Islām-lah dīn yang benar dan sempurna terjelma. Di dalam Islām, manusia dikenal sebagai hamba/‘abd (yang diberikan kewajiban untuk beribadah) sekaligus perwakilan /khalifah Tuhan (dengan amānah untuk menegakkan keadilan) di muka bumi.

Dalam memenuhi kewajiban dan amanah tersebut, manusia dibekali jiwa yang serupa dengan sifat gandanya: jiwa yang luhur (jiwa akali/al-nafs al-nāṭiqah) dan jiwa yang rendah (jiwa hewani/ al-nafs al-ḥayawāniyyah). Dalam kerangka diri pribadi manusia, kuasa jiwa akali atas jiwa hewani, itulah salah satu makna konseptual dari kata agama (dīn). Sementara kerelaan, ketundukan dan kepasrahan jiwa hewani untuk senantiasa berada dalam bimbingan dan pimpinan jiwa akali itulah Islām.

Pengendalian jiwa akali atas jiwa hewani, dan ketundukan jiwa hewani pada jiwa akali ini, akan mengantarkan manusia pada tujuan dan hakikat penciptaan serta kewujudannya. Ia akan mencapai keluhuran diri dan jiwa akalinya mencapai makam spiritual yang di dalam al-Qur’an (Surah al-Fajr [89]: 27:30) digambarkan sebagai al-nafs al-muṭma’innah. Jiwa seorang hamba yang telah memenuhi dan kembali menyadari persaksiannya kepada Tuhan “di zaman alastu”. Penyerahan diri atau ‘ibādah di tingkat tertinggi ini juga bermakna ilmu: ma‘rifah. Suatu pengalaman mengintuisi wujud secara ruhaniah.

Meskipun penterjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab menghadirkan tantangan dan perdebatan dalam pemahaman dan interpretasi, dampak positifnya dalam pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pemikiran intelektual di dunia Islam sangat besar. Hal ini menciptakan fondasi untuk Zaman Keemasan Islam, di mana umat Muslim mencapai kemajuan besar dalam berbagai bidang pengetahuan dan menciptakan warisan ilmiah yang berharga bagi peradaban manusia.

KESIMPULAN

Menurut al-Farabi, seorang pimpinan utama dalam menjalankan kepemimpinannya, memiliki dua tugas utama yang saling berhubungan satu sama lain yaitu: pengajaran dan pembentukan karakter (kepribadian yang baik) al-Ta‘lim wa al-Ta’dib. Kota utama adalah kota yang diperintah oleh penguasa tertinggi yang benar-benar memiliki berbagai ilmu dan setiap jenis pengetahuan, ia mampu memahami dengan baik segala yang harus dilakukannya. Al-Farabi menyatakan bahwa yang menjadi pimpinan pada setiap kota haruslah orang yang mempunyai nilai lebih dari warga kota yang lain sehingga dia dapat mendidik dan membimbing rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Abu al-Hasan al-Mawardi. *al-Ahkām al-Sultāniah*. Beirut: Dār al Fikr, t.t.
- Abu Hamid al-Ghazali,. *Ihya' Ulumudin*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999.
- Abu Wafa, Romli. *Rekontruksi Doktrin Pemikiran dan Politik Aswaja Cet. 1*. Bogor: al-Azhar Press, 2012.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- . *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of The Fundamental Element of The Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
- Al-Farabi. *Kitab al-Siyasah al-Madaniyah*. Malaysia: Kementrian Pendidikan Malaysia, t.t.
- Al-Farabi,. *Kitab Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*,. Beirut: Dar wa Maktabah Al-Hilal, t.t.
- Alhijri, Muhammad Rasyidil Fikri, Amir Reza Kusuma, Ari Susanto, Zakki Azani, dan Mohamad Ali. "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.
- Azyumardi Azra. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme Khilafatisme dan Demokrasi*. Jakarta: 2016, t.t.
- Budi Raharjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia utama, 2009.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Isfaroh. "Abu Bakr Alrazi's Theistic-Naturalism." *Al-A'raf XVI*, no. 2 (2019): 215.
- Jonathan Wolff. *Pengantar Filsafat Politik, cet.1*. Bandung: Nusa media, 2013.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Latief, Mohamad, Amir Reza Kusuma, Mohammad Muslih, dan Rakhmad Agung Hidayatullah. "Problems of the Secular State and Its Impact on Justice" 23, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI:http://doi.org/10.24042/ajsk.v23i1.18500>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM

SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ” 7 (2022).

———. “PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ” 7 (2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.

Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. “Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy” 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

Mohd. Farid Mohd Shahrān. Fakhṛ Al-Dīn Al-Rāzī on Divine Transcendence and Anthropomorphism; A Refutation Against the Literalists. New York: Putra Jaya: Islamic and Strategic Studies Institute, 2017.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. On Justice and Nature of Man. Kuala Lumpur: IBFIM, 2015.